



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Mei 2019/Khusus - Calon PN)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)  
**UNIT KERJA** : KEDEPUTIAN BIDANG OPERASI Pencarian dan Pertolongan dan KESIAPSIAGAAN  
**SUB UNIT KERJA** : DIREKTORAT OPERASI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : H BUDI PURNAMA
2. Jabatan : DIREKTUR OPERASI
3. NHK : 641702

**II. DATA HARTA**

- A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.150.000.000
1. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
  2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , WARISAN Rp. 500.000.000
  3. Tanah Seluas 6090 m2 di KAB / KOTA PASURUAN, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
  4. Tanah Seluas 4990 m2 di KAB / KOTA PASURUAN, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
- B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 313.000.000
1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
  2. MOBIL, HONDA HRV JEEP Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
  3. MOBIL, FORD ECOSPORT MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
- C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 21.000.000
- D. SURAT BERHARGA** Rp. ----
- E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 47.000.000
- F. HARTA LAINNYA** Rp. ----
- Sub Total** Rp. 1.531.000.000



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.531.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **28 Agustus 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.